

TAHUN 2025

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RKPD)



DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KOTA PROBOLINGGO

JL. SLAMET RIYADI NO.20 PROBOLINGGO



disperinaker@probolinggokota.go.id

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas Rahmat dan HidayahNya semata, akhirnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo Tahun 2025 ini dapat kami susun dan diselesaikan dengan baik.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo Tahun 2025 ini telah tercermin dalam Permendagri No 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dengan telah selesainya Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo Tahun 2025 ini, kami berharap dapat menjadikan tolak ukur keberhasilan pelaksanaan tugas operasional Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo. Kami menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo Tahun 2025 ini, oleh karenanya kami sangat berterimakasih atas saran dan kritik yang ada demi perbaikan di masa mendatang.

1.1 Latar Belakang

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Tahapan ini dilaksanakan dalam rangka pembangunan daerah yang memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah, proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatannya melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Rencana Kerja mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Rencana Kerja menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Renstra Perangkat Daerah) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan, Rencana Kerja menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah – langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian Rencana Kerja merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dimana kebijakan umum APBD ditetapkan secara bersama – sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Pemerintah. Dengan cakupan dan cara penetapan tersebut, Rencana Kerja mempunyai fungsi pokok dan menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan karena memuat seluruh kebijakan publik sebagai berikut :

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD karena memuat arah kebijakan Pembangunan Daerah satu tahun;
2. Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen Pemerintah.

Proses penyusunan Rencana Kerja didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan Daerah pada tahun sebelumnya.

Lebih lanjut penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, hal ini sejalan dengan Pasal 2 (dua) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa Daerah Kabupaten dan Kota merupakan bagian dari Provinsi serta mempunyai hubungan wewenang, keuangan, Pelayanan umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya lainnya. Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah serta masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan Kota Probolinggo.

Sebagai Dokumen resmi Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang dilanjutkan dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah berfungsi menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana regional dengan memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Perangkat Daerah. Sebagai rencana operasional, Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan APBD.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, memuat rancangan kerangka ekonomi makro yang termasuk disalamnya arah kebijakan fisik dan moneter, prioritas pembangunan, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo Tahun 2025 dan pendanaannya menggunakan Renja K/L dan rancangan RKPD Provinsi sebagai bahan masukan.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA), sejumlah peraturan telah digunakan sebagai dasar, yaitu :

1. UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD Dan RPJMD Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, Dan RKPD;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019-2024;
18. Perwali Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Perwali Nomor 219 Tahun 2019 tentang IKU Pemerintah Kota Probolinggo dan PD di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo;
19. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 48 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Probolinggo Tahun 2024
20. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
22. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);

24. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 Provinsi Jawa Timur tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
25. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2024;
26. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Probolinggo Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 Nomor 11);
27. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2021 tentang PERUBAHAN ATAS Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2021 Nomor 3);dan
28. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2022 Nomor 7).
29. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 95 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
30. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 219 Tahun 2019 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Probolinggo Dan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo Tahun 2025 bermaksud untuk mewujudkan komitmen dan konsistensi perencanaan program serta pelaksanaan kegiatan yang dioperasionalisasikan secara konsekuen berdasarkan pada prioritas yang telah ditetapkan sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan daerah yang didukung sistem pengawasan dan pengendalian yang efektif.

1.3.2.Tujuan

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- a) Sebagai acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) maupun prioritas di Dinas perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo Tahun 2025;
- b) Sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo Tahun 2025;
- c) Mengevaluasi / mereview hasil kegiatan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo di tahun sebelumnya;
- d) Mencari solusi/pemecahan masalah yang dihadapi pada tahun sebelumnya agar tidak terjadi di tahun yang akan datang;
- e) Sebagai pedoman taktis dan strategis dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu dan tenaga kerja selama 1 (satu) tahun ke depan.

1.4 Sistematika Penyusunan

Rencana Kerja Dinas Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo Tahun 2025.

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika penulisan

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo Tahun lalu

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD;

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;;

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD;

2.4 Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah;

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat;

BAB III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Tahun 2025

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional;

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah;

3.3 Program dan Kegiatan;

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dijelaskan mengenai Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V Penutup

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Hasil evaluasi pelaksanaan renja memuat tentang hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1). Adapun rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan renja dan pencapaian renstra sampai dengan 2023 sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo

Tabel T-C.29

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PER

Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2025

Organisasi : 3.31.2.07.0.00.01.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2025)	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) (Tahun 2025)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi renja Peragkat daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi (%)
1					2	3	4	5 (n-3)	6 (n-2)	7 (n-2)	8 = (7/6)	9 (n-1)	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		100							
2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA		100		0	0	0	11.472.055.712.00	-	
2	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100		0	0	0	7.525.875.692.00	-	
2	07	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal 80%	100		0	0	0	72.395.500.00	-	
2	07	01	2.01	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10		0	0	0	35.395.500		
2	07	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10		0	0	0	37.000.000		

2	07	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan			0	0	0	6.635.282.692.00	-	
2	07	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	61		0	0	0	6.510.680.692		
2	07	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12		0	0	0	112.962.000		
2	07	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan / Semesteran SKPD	12		0	0	0	11.640.000		
2	07	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi BMD Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	100		0	0	0	8.450.000.00	-	
2	07	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	20		0	0	0	8.450.000		
2	07	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	100		0	0	0	2.500.000.00	-	
2	07	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	49		0	0	0	2.500.000		
2	07	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	100		0	0	0	152.178.780.00	-	
2	07	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12		0	0	0	26.799.880		
2	07	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6		0	0	0	4.647.400		
2	07	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan yang Disediakan	72		0	0	0	1.560.000		
2	07	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6		0	0	0	3.000.000		
2	07	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50		0	0	0	94.892.000		

2	07	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100		0	0	0	5.747.000		
2	07	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12		0	0	0	15.532.500		
2	07	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD Perangkat Daerah yang terpenuhi	100		0	0	0	189.227.000.00	-	
2	07	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	33		0	0	0	189.227.000		
2	07	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Ketatalaksanaan yang Terpenuhi	100		0	0	0	340.979.500.00	-	
2	07	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12		0	0	0	50.680.000		
2	07	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	18		0	0	0	290.299.500		
2	07	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik	100		0	0	0	124.862.220.00	-	
2	07	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	14		0	0	0	77.084.600		
2	07	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100		0	0	0	27.777.500		
2	07	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1		0	0	0	20.000.120		
2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja dan Tenaga Kerja yang Mendapatkan Fasilitas Pelatihan dan Peningkatan Produktivitas	93		0	0	0	3.727.598.720.00	-	
2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase Pencari Kerja yang mendapatkan Fasilitas Pelatihan Berbasis Kompetensi	93		0	0	0	3.727.598.720.00	-	

2	07	03	2.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	48		0	0	0	3.526.460.200		
2	07	03	2.01	02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	9		0	0	0	201.138.520		
2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang mendapatkan Fasilitas Penempatan Tenaga Kerja	93		0	0	0	68.011.500.00	-	
2	07	04	2.01		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencari Kerja yang mendapatkan Fasilitas Pelayanan Antar Kerja	100		0	0	0	58.936.500.00	-	
2	07	04	2.01	05	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	25		0	0	0	58.936.500		
2	07	04	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase Pencari Kerja yang mendapatkan fasilitas Informasi Pasar Kerja	80		0	0	0	9.075.000.00	-	
2	07	04	2.03	03	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	125		0	0	0	9.075.000		
2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang memenuhi persyaratan kerja	72		0	0	0	150.569.800.00	-	
						Persentase penurunan kasus perselisihan hubungan industrial	52							
2	07	05	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perusahaan yang telah menetapkan Peraturan Perusahaan terkait Hubungan Industrial dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama	130		0	0	0	39.999.800.00	-	
2	07	05	2.01	03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	80		0	0	0	39.999.800		

2	07	05	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penurunan kasus perselisihan hubungan industrial	79		0	0	0	110.570.000.00	-	
2	07	05	2.02	01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	15		0	0	0	110.570.000		
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				0	0	0	363.500.000.00	-	
3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Kebutuhan Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Industri yang Difasilitasi	82		0	0	0	317.769.700.00	-	
3	31	02	2.01		Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase Rencana Pembangunan Industri yang dilaksanakan	82		0	0	0	317.769.700.00	-	
3	31	02	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	4		0	0	0	35.000.000		
3	31	02	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	8		0	0	0	106.384.000		
3	31	02	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	2		0	0	0	175.385.700		
3	31	02	2.01	04	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1		0	0	0	1.000.000		
3	31	03			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang diterbitkan sesuai ketentuan	60		0	0	0	10.000.000.00	-	
3	31	03	2.01		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan	Persentase Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI)	60		0	0	0	10.000.000.00	-	

					Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang diterbitkan sesuai ketentuan								
3	31	03	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	10		0	0	0	10.000.000		
3	31	04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Data Industri yang dikelola dengan SIINAS (Sistem Informasi Industri Nasional)	70		0	0	0	35730300	0	
3	31	04	2.01		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Data Industri yang dikelola dengan SIINAS (Sistem Informasi Industri Nasional)	70		0	0	0	35730300	0	
3	31	04	2.01	01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	4		0	0	0	35.730.300		
JUMLAH												11.835.555.712	0	

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan

Pada Tahun 2025 Indikator Kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja sebagaimana telah ditetapkan, dapat dilihat pada tabel berikut :

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KOTA PROBOLINGGO

NO	Indikator (IKU OPD)	SPM / standar nasional (bila ada)	IKK (bila ada)	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisa
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Peningkatan Nilai Produksi Sektor Industri			50M	50M	50M	50M	50M	103,20%	50M	50M	
2	Persentase Pencari kerja yang ditempatkan pada sektor Formal dan Informal			83.30%	88.30%	93.30%	98,3%	88.30%	100,21%	93,3%	94%	
3	Persentase perusahaan yang memenuhi persyaratan kerja						70%		101%	70%	75%	
	Persentase penurunan kasus perselisihan hubungan industrial						57%		126%	57%	60%	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo

Isu-isu strategis atau kondisi harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa mendatang. Apabila kondisi yang menjadi isu strategis tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang besar dan menghilangkan peluang bagi peningkatan layanan kepada masyarakat.

PERMASALAHAN & ISU – ISU STRATEGIS :

Urusan Perindustrian :

1. Kurangnya hasil Produk IKM yang berstandarisasi dan bersertifikasi untuk berdaya saing
2. Kurangnya kemampuan penguasaan teknologi industri yang tepat serta berwawasan lingkungan
3. Kurangnya akses industri terhadap sumberdaya ekonomi produktif, sarana dan usaha industri
4. Kurangnya standarisasi produk yang dimiliki oleh IKM
5. Kesadaran Pelaku IKM untuk Memenuhi Legalitas/HAKI masih rendah
6. Pelaporan Hasil Kinerja Produksi Pelaku Industri (Industri Kecil, Menengah dan Besar) belum maksimal

Urusan Tenaga Kerja

1. Tidak imbangnya pertumbuhan angkatan kerja dengan kesempatan kerja. Faktor – faktor yang mempengaruhi diantaranya :
 - a. Motivasi dan jiwa kewirausahaan untuk menciptakan lapangan kerja baru masih rendah dan masih mengandalkan sektor formal;
 - b. Rendahnya kesadaran calon tenaga kerja dalam meningkatkan kemampuan, kompetensi dan keterampilan diri dalam persaingan dunia kerja.
2. Kualitas pelatihan umumnya masih rendah dikarenakan kurangnya tenaga instruktur serta program pelatihan pada umumnya tidak menjamin penempatan;
3. Perusahaan yang menerapkan UMK jumlahnya masih sedikit dikarenakan banyak perusahaan yang menyatakan kurang mampu menerapkan UMK dan tidak ada sanksi hokum bagi perusahaan yang tidak menerapkan UMK;
4. Kesadaran pengusaha untuk patuh terhadap aturan ketenagakerjaan masih rendah. Hal ini dikarenakan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan sanksi, peran Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo hanya melakukan fungsi pembinaan;
5. Masih terdapat kasus perselisihan hubungan industrial tiap tahunnya. Faktor – faktor yang mempengaruhi diantaranya :
 - a. Pemahaman peraturan ketenagakerjaan oleh pekerja masih kurang;

- b. Kurangnya monitoring dan evaluasi pasca pembinaan dan kunjungan tim deteksi dini oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan daerah (RKPD) Tahun 2025, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo menetapkan program prioritas sebagai berikut :

Tabel T-C.31.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025
Urusan : Ketenagakerjaan

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KOTA PROBOLINGGO

No	Rancangan Awal RKPD					Rancangan Awal RKPD				
	Program/Kegiatan 2025	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan 2025	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
					(Rp.000)					(Rp.000)
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Kota Probolinggo			9.669.718.621	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Kota Probolinggo			9.669.718.621
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Probolinggo		100	9.194.622.989	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Probolinggo		100	9.194.622.989
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Probolinggo	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal 80%	100	49.500.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Probolinggo		100	49.500.000
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Probolinggo	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	8.800.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Probolinggo	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	8.800.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Probolinggo	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10	40.700.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Probolinggo	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10	40.700.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Probolinggo	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan		7.738.264.767	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Probolinggo			7.738.264.767
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Probolinggo	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	61	7.601.202.567	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Probolinggo	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	61	7.601.202.567
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Probolinggo	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	124.258.200	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Probolinggo	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	124.258.200
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Probolinggo	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	12	12.804.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Probolinggo	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	12.804.000

	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Probolinggo	Persentase Administrasi BMD Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	100	14.795.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Probolinggo	Persentase Administrasi BMD Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	100	14.795.000
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Probolinggo	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	20	14.795.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Probolinggo	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	20	14.795.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Probolinggo	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	100	2.750.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Probolinggo	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	100	2.750.000
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kota Probolinggo	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	49	2.750.000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kota Probolinggo	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	49	2.750.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	100	178.032.822	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	100	178.032.822
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Probolinggo	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	36.534.872	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Probolinggo	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	36.534.872
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Probolinggo	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6	7.700.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Probolinggo	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6	7.700.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Probolinggo	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	72	3.432.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Probolinggo	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	72	3.432.000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Probolinggo	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6	5.500.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Probolinggo	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6	5.500.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Probolinggo	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50	104.480.200	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Probolinggo	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50	104.480.200
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Probolinggo	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100	3.300.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Probolinggo	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100	3.300.000
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Probolinggo	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12	17.085.750	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Probolinggo	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12	17.085.750
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Probolinggo	Persentase BMD Perangkat Daerah yang terpenuhi	100	92.400.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Probolinggo	Persentase BMD Perangkat Daerah yang terpenuhi	100	92.400.000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Probolinggo	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	33	92.400.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Probolinggo	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	33	92.400.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Probolinggo	Persentase Kebutuhan Ketatalaksanaan yang Terpenuhi	100	798.838.700	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Probolinggo	Persentase Kebutuhan Ketatalaksanaan yang Terpenuhi	100	798.838.700
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Probolinggo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	105.666.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Probolinggo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	105.666.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Probolinggo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	18	693.172.700	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Probolinggo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	18	693.172.700
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase BMD dalam kondisi baik	100	320.041.700	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase BMD dalam kondisi baik		320.041.700

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan	Kota Probolinggo	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	14	166.294.700	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan	Kota Probolinggo	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	14	166.294.700
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Probolinggo	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100	38.247.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Probolinggo	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100	38.247.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Probolinggo	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	115.500.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Probolinggo	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	115.500.000
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Kota Probolinggo	Persentase Pencari Kerja dan Tenaga Kerja yang Mendapatkan Fasilitas Pelatihan dan Peningkatan Produktivitas	93	246.184.202	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Kota Probolinggo	Persentase peningkatan Pelatihan dan produktifitas tenaga kerja	93	246.184.202
	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi		Persentase Pencari Kerja yang mendapatkan Fasilitas Pelatihan Berbasis Kompetensi	93	246.184.202	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi		Persentase sertifikat pelatihan yang diterbitkan sesuai dengan kompetensinya	93	246.184.202
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi		Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	48	101.088.130	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi		Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	48	101.088.130
	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja		Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	9	145.096.072	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja		Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	9	145.096.072
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Kota Probolinggo	Persentase Tenaga Kerja yang mendapatkan Fasilitas Penempatan Tenaga Kerja	93	85.911.650	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Kota Probolinggo	Persentase penempatan tenaga kerja	93	85.911.650
	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Persentase Pencari Kerja yang mendapatkan Fasilitas Pelayanan Antar Kerja	100	72.728.150	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Persentase Pencari Kerja yang mendapatkan Fasilitas Pelayanan Antar Kerja	100	72.728.150
	Perluasan Kesempatan Kerja	Kota Probolinggo	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	25	72.728.150	Perluasan Kesempatan Kerja	Kota Probolinggo	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	25	72.728.150
	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Kota Probolinggo	Persentase Pencari Kerja yang mendapatkan fasilitas Informasi Pasar Kerja	80	13.183.500	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Kota Probolinggo	Persentase Pencari Kerja yang mendapatkan fasilitas Informasi Pasar Kerja	80	13.183.500
	Job Fair/Bursa Kerja	Kota Probolinggo	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	125	13.183.500	Job Fair/Bursa Kerja	Kota Probolinggo	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	125	13.183.500
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Kota Probolinggo	Persentase Perusahaan yang memenuhi persyaratan kerja	72	142.999.780	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Kota Probolinggo	Persentase Perusahaan yang memenuhi persyaratan kerja	72	142.999.780
			Persentase penurunan kasus perselisihan hubungan industrial	52				Persentase penurunan kasus perselisihan hubungan industrial	52	

	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Persentase Perusahaan yang telah menetapkan Peraturan Perusahaan terkait Hubungan Industrial dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama	130	43.999.780	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Jumlah perusahaan yang mendapatkan fasilitasi pemenuhan persyaratan kerja	130	43.999.780
	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Kota Probolinggo	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	80	43.999.780	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Kota Probolinggo	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	80	43.999.780
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota		Persentase penurunan kasus perselisihan hubungan industrial	79	99.000.000	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota		Persentase penurunan kasus perselisihan hubungan industrial	79	99.000.000
	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah		Jumlah Perselisihan yang Dicegah	15	99.000.000	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah		Jumlah Perselisihan yang Dicegah	15	99.000.000
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	Kota Probolinggo			298.299.078	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	Kota Probolinggo			298.299.078
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Kota Probolinggo	Persentase Kebutuhan Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Industri yang Difasilitasi	82	270.205.298	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Kota Probolinggo	Persentase Kebutuhan perencanaan dan evaluasi pembangunan industri yang difasilitasi	82	270.205.298
	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Persentase Rencana Pembangunan Industri yang dilaksanakan	82	270.205.298	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Persentase Rencana Pembangunan Industri yang dilaksanakan	82	270.205.298
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Kota Probolinggo	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	4	94.812.850	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Kota Probolinggo	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	4	94.812.850
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Kota Probolinggo	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	8	156.870.670	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Kota Probolinggo	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	8	156.870.670
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kota Probolinggo	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	2	16.871.778	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kota Probolinggo	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	2	16.871.778
	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Kota Probolinggo	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1	1.650.000	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Kota Probolinggo	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1	1.650.000

	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI		Persentase Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang diterbitkan sesuai ketentuan	60	11.000.000	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI		Persentase Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang diterbitkan sesuai ketentuan	60	11.000.000
	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Persentase Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang diterbitkan sesuai ketentuan	60	11.000.000	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Persentase Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang diterbitkan sesuai ketentuan	60	11.000.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	10	11.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	10	11.000.000
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Kota Probolinggo	Persentase Data Industri yang dikelola dengan SIINAS (Sistem Informasi Industri Nasional)	70	17.093.780	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Kota Probolinggo	Persentase Data Industri yang dikelola dengan SIINAS (Sistem Informasi Industri Nasional)	70	17.093.780
	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Persentase Data Industri yang dikelola dengan SIINAS (Sistem Informasi Industri Nasional)	70	17.093.780	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Persentase pelaku industri yang menyampaikan laporan data industri	70	17.093.780
	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Kota Probolinggo	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	4	17.093.780	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Kota Probolinggo	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	4	17.093.780
JUMLAH					9.968.017.699	JUMLAH				9.968.017.699

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Tahun 2023 Walikota Probolinggo mempunyai tema pembangunan yaitu “Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemandirian daerah melalui penguatan Ekonomi Inklusif yang didukung Pemenuhan Infrastruktur”..

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja mengampu 2 (dua) Misi Pembangunan Kota Probolinggo yaitu :

- 1. Pembangunan Ekonomi yang Berdaya Saing Berbasis Sektor Potensial
- 2. Sumber daya manusia dan kesejahteraan sosial yang berkualitas;

Adapun strategi dan arah kebijakan yang digunakan oleh Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo dalam mendukung

Prioritas pembangunan Pemerintah Kota Probolinggo tahun 2025 adalah sebagai berikut :

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	URAIAN KEGIATAN
1	Peningkatan Kemandirian masyarakat sebagai upaya percepatan sektor ekonomi produktif	Meningkatkan Kemandirian Industri Kecil Menengah melalui fasilitasi pengembangan dan penguatan daya saing usaha	1. Pembinaan dan Pelatihan Peningkatan ualitas Produk IKM 2. Fasilitasi HAKI (Hak atas Kekayaan Intelektual)	- Memberikan Pendampingan, Pembinaan dan Pelatihan Pengembangan Produk IKM - Fasilitasi Perizinan IKM - Fasilitasi Sarana Pemasaran Produk IKM - Pelaporan Data Industri pada Siinas
2	Pemantapan kualitas Sumber Daya Manusia yang berorientasi pada pasar tenaga kerja	Mewujudkan penurunan jumlah pengangguran serta hubungan industrial yang kondusif	1. Program Penempatan, perluasan, pelatihan dan produktifitas tenaga kerja; 2. Program Penempatan Tenaga Kerja 3. Hubungan Industrial	- Memberikan pelatihan kerja yang banyak tepat - Mengadakan MOU dengan BLK dan LPK swasta, - Mengoptimalkan kerjasama dengan perusahaan terkait permintaan lowongan kerja - pendampingan masalah ketegakerjaan/hubungan industrial

Selain program dan kegiatan yang diusulkan oleh Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo untuk perencanaan pembangunan juga mengakomodir usulan program kegiatan yang berasal dari bawah / masyarakat (bottom up).

Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo

[illegible]

3.1 TELAAHTERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional, sistem perencanaan pembangunan propinsi serta sistem perencanaan pembangunan Kota Probolinggo. Oleh karena itu, Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Probolinggo, sehingga dapat dikatakan bahwa Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo bersinergi dengan dokumen perencanaan lain, baik Nasional, seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Rencana Kerja Pemerintah Nasional, maupun di tingkat Provinsi, seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jawa Timur 2005–2025, Rencana Panjang Jangka Pemerintah Daerah Kota Probolinggo Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019-2024, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Probolinggo Tahun 2025.

1. Berdasarkan sasaran Renstra Perangkat Daerah **“meningkatnya PDRB di sektor Perindustrian”** dengan arah kebijakan :
 - ❖ Memperkuat iklim usaha dan peluang investasi daerah
 - ❖ Meningkatkan produktivitas, daya saing dan pemasaran produk lokal
 - ❖ Memperkuat sentra-sentra Produk Unggulan Daerah berbasis kewilayahan
2. Berdasarkan sasaran Renstra Perangkat Daerah **“meningkatnya kualitas penyerapan tenaga kerja ”** dengan arah kebijakan:
 - ❖ Memperkuat program Jaminan Sosial bidang ketenagakerjaan
 - ❖ Menjamin proporsi upah yang proporsional dan tepat sasaran
 - ❖ Meningkatkan dan mengoptimalkan kualitas perlindungan dan keselamatan tenaga kerja
 - ❖ Meningkatkan kepesertaan program Jaminan Sosial
 - ❖ Meningkatkan cakupan serapan tenaga kerja pada sector – sector lain secara merata
 - ❖ Mengoptimalkan laju pertumbuhan PDB perkapita tenaga kerja untuk efektifitas pembangunan
 - ❖ Memberikan pelatihan untuk peningkatan skill terhadap sektor strategis dan potensial melalui balai latihan kerja

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

3.2.1 TUJUAN

Dalam rangka mendukung upaya mengembangkan sasaran yang ingin dicapai oleh suatu organisasi, perlu dirumuskan beberapa tujuan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang dengan asumsi bahwa Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo tetap konsisten dengan tujuan yang dikembangkan dalam periode tersebut. Tujuan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo yaitu :

- a. Meningkatnya Daya Saing Sektor Industri
- b. Meningkatnya kualitas penyerapan tenaga kerja.

Penetapan tujuan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo pada umumnya didasarkan pada isu-isu strategis. Tujuan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dalam kurun waktu tahun 2025 - 2026 dan mengarahkan perumusan sasaran, program dan kegiatan.

3.2.2 SASARAN

Sasaran strategis adalah penjabaran dari Tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo dalam kurun waktu satu tahun.

Penetapan sasaran dirumuskan lebih spesifik, terukur, berorientasi pada hasil, dapat dicapai, dan memiliki kurun waktu satu tahun. Dalam Sasaran dirancang pula **Indikator Pencapaian Sasaran**, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang telah diidentifikasi untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan dan disertai dengan targetnya masing-masing.

Atas dasar arti dan makna penetapan sasaran dimaksud, serta berdasarkan arahan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran strategis Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo yang akan diwujudkan dalam kurun waktu sampai dengan 5 (lima) tahun terakhir (2025 - 2026), ditetapkan sebagai berikut :

- a. Meningkatnya nilai produksi sektor industri;
- b. Meningkatnya penempatan tenaga kerja pada sector formal dan informal;
- c. Meningkatnya perlindungan tenaga kerja.

4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Program prioritas yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah mengacu pada program prioritas pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019- 2024, di mana prioritas program tersebut telah menggambarkan target indikator capaian kinerja selama 5 (lima) tahun. Program prioritas pembangunan daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dijabarkan oleh Perangkat Daerah dalam Renstra Perangkat Daerah, masing-masing program dijabarkan kedalam kegiatan disertai pagunya.

Setiap program prioritas harus memiliki indikator kinerja yang jelas dan dapat diukur tingkat capaiannya. Pencapaian kinerja program merupakan akumulasi dari pencapaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan. Selanjutnya, program prioritas dan pagu indikatif yang telah ditetapkan untuk rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah, disampaikan ke Organisasi Pemerintah Daerah sesuai program terkait beserta pagu indikatif untuk diproses lebih lanjut untuk mendapatkan kegiatan prioritas masing-masing program dimaksud. Dalam penyusunan prioritas kegiatan Organisasi Pemerintah Daerah juga memperhatikan kegiatan yang telah disusun dalam dokumen Renstra Organisasi Pemerintah Daerah sehingga terjadi keselarasan dalam penyusunan program dan kegiatan yang telah disusun oleh Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah. Program, capaian kinerja, beserta pagu indikatifnya, sebagaimana tabel T-C.33.

Pada tahun 2025 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo merumuskan 2 (dua) urusan, 7 (Tujuh) program, 16 (Tujuh belas) kegiatan dan 32 (tiga puluh lima) sub kegiatan. Total keseluruhan kebutuhan dana sesuai dengan pagu indikatif yang telah ditetapkan adalah sebesar Rp.9.968.017.699,- dengan sumber dana dari DAU.

4.2. PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025

Adapun rumusan rencana program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo Tahun 2025 dan perkiraan maju Tahun 2026 disajikan sebagaimana tabel berikut :

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2025

Organisasi : 3.31.2.07.0.00.01.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2023)	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) (Tahun 2024)	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting	Perkiraan Maju		
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2026
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				9.669.718.621				10.636.690.483
2	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Kota Probolinggo	100	9.194.622.989		Kota Probolinggo	100	10.114.085.288
2	07	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Kota Probolinggo	100	49.500.000		Kota Probolinggo	100	54.450.000
2	07	01	2.01	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Probolinggo	10	Rp8.800.000		Kota Probolinggo	10	Rp9.680.000
2	07	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Probolinggo	10	40.700.000		Kota Probolinggo	10	Rp44.770.000
2	07	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	Kota Probolinggo	100	7.738.264.767.00		Kota Probolinggo		8.512.091.244
2	07	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Probolinggo	61	7.601.202.567		Kota Probolinggo	61	Rp8.361.322.824
2	07	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Probolinggo	12	124.258.200		Kota Probolinggo	12	Rp136.684.020
2	07	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Probolinggo	12	12.804.000		Kota Probolinggo	12	Rp14.084.400
2	07	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi BMD Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	Kota Probolinggo	100	14.795.000.00		Kota Probolinggo	100	16.274.500
2	07	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Probolinggo	20	14.795.000		Kota Probolinggo	20	Rp16.274.500

2	07	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	Kota Probolinggo	100	2.750.000.00		Kota Probolinggo	100	3.025.000.00
2	07	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kota Probolinggo	49	2.750.000		Kota Probolinggo	49	Rp3.025.000
2	07	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	Kota Probolinggo	100	178.032.822		Kota Probolinggo	100	195.836.104
2	07	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Probolinggo	12	36.534.872		Kota Probolinggo	12	Rp40.188.359
2	07	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Probolinggo	6	7.700.000		Kota Probolinggo	6	Rp8.470.000
2	07	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Probolinggo	72	3.432.000		Kota Probolinggo	72	Rp3.775.200
2	07	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Probolinggo	6	5.500.000		Kota Probolinggo	6	Rp6.050.000
2	07	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Probolinggo	50	104.480.200		Kota Probolinggo	50	Rp114.928.220
2	07	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Probolinggo	100	3.300.000		Kota Probolinggo	100	Rp3.630.000
2	07	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Probolinggo	12	17.085.750		Kota Probolinggo	12	Rp18.794.325
2	07	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD Perangkat Daerah yang terpenuhi	Kota Probolinggo	100	92.400.000		Kota Probolinggo	100	101.640.000
2	07	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Probolinggo	33	92.400.000		Kota Probolinggo	33	Rp101.640.000
2	07	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Ketatalaksanaan yang Terpenuhi	Kota Probolinggo	100	798.838.700		Kota Probolinggo	100	878.722.570
2	07	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Probolinggo	12	105.666.000		Kota Probolinggo	12	Rp116.232.600
2	07	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Probolinggo	18	693.172.700		Kota Probolinggo	18	Rp762.489.970
2	07	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik	Kota Probolinggo	100	320.041.700		Kota Probolinggo	100	352.045.870
2	07	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Probolinggo	14	166.294.700		Kota Probolinggo	14	Rp182.924.170

2	07	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Probolinggo	100	38.247.000		Kota Probolinggo	100	Rp42.071.700
2	07	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Probolinggo	1	115.500.000		Kota Probolinggo	1	Rp127.050.000
2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja dan Tenaga Kerja yang Mendapatkan Fasilitas Pelatihan dan Peningkatan Produktivitas Pelatihan dan produktifitas tenaga kerja	Kota Probolinggo	93.3	246.184.202		Kota Probolinggo	99,3	270.802.622
2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase Pencari Kerja yang mendapatkan Fasilitas Pelatihan Berbasis Kompetensi	Kota Probolinggo	93.3	246.184.202		Kota Probolinggo	244	270.802.622
2	07	03	2.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Kota Probolinggo	48	101.088.130		Kota Probolinggo	48	Rp111.196.943
2	07	03	2.01	02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	Kota Probolinggo	9	145.096.072		Kota Probolinggo	9	Rp159.605.679
2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang mendapatkan Fasilitas Penempatan Tenaga Kerja	Kota Probolinggo	93.3	85.911.650		Kota Probolinggo	93.3	94.502.815
2	07	04	2.01		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencari Kerja yang mendapatkan Fasilitas Pelayanan Antar Kerja	Kota Probolinggo	100	72.728.150		Kota Probolinggo	100	80.000.965
2	07	04	2.01	05	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	Kota Probolinggo	25	72.728.150		Kota Probolinggo	25	Rp80.000.965
2	07	04	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase Pencari Kerja yang mendapatkan fasilitas Informasi Pasar Kerja	Kota Probolinggo	80	13.183.500		Kota Probolinggo	80	14.501.850
2	07	04	2.03	03	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	Kota Probolinggo	125	13.183.500		Kota Probolinggo	125	Rp14.501.850
2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang memenuhi persyaratan kerja	Kota Probolinggo	72	142.999.780		Kota Probolinggo	72	157.299.758
						Persentase penurunan kasus perselisihan hubungan industrial	Kota Probolinggo	52			Kota Probolinggo	52	
2	07	05	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perusahaan yang telah menetapkan Peraturan Perusahaan terkait Hubungan Industrial dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama	Kota Probolinggo	130	43.999.780		Kota Probolinggo	130	48.399.758
2	07	05	2.01	03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Kota Probolinggo	80	43.999.780		Kota Probolinggo	80	Rp48.399.758
2	07	05	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan	Persentase penurunan kasus perselisihan hubungan industrial	Kota Probolinggo	79	99.000.000		Kota Probolinggo	79	108.900.000

					di Daerah Kabupaten/Kota								
2	07	05	2.02	01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Kota Probolinggo	15	99.000.000		Kota Probolinggo	15	Rp108.900.000
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				298.299.078				328.128.986
3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Kebutuhan perencanaan dan evaluasi pembangunan industri yang difasilitasi	Kota Probolinggo	82%	270.205.298		Kota Probolinggo	82%	297.225.828
3	31	02	2.01		Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase Rencana Pembangunan Industri yang dilaksanakan	Kota Probolinggo	82	270.205.298		Kota Probolinggo	82	297.225.828
3	31	02	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Kota Probolinggo	4	94.812.850		Kota Probolinggo	4	Rp104.294.135
3	31	02	2.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Kota Probolinggo	8	156.870.670		Kota Probolinggo	8	Rp172.557.737
3	31	02	2.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kota Probolinggo	2	16.871.778		Kota Probolinggo	2	Rp18.558.956
3	31	02	2.01	06	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Kota Probolinggo	1	1.650.000		Kota Probolinggo	1	Rp1.815.000
3	31	03			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang diterbitkan sesuai ketentuan	Kota Probolinggo	60%	11.000.000		Kota Probolinggo	60%	12.100.000
3	31	03	2.01		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang diterbitkan sesuai ketentuan	Kota Probolinggo	60%	11.000.000		Kota Probolinggo	60%	12.100.000
3	31	03	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Kota Probolinggo	10	11.000.000		Kota Probolinggo	10	Rp12.100.000
3	31	04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Presentase Data Industri yang dikelola dengan SIINAS (Sistem Informasi Industri Nasional)	Kota Probolinggo	70%	17.093.780		Kota Probolinggo	70%	Rp18.803.158

3	31	04	2.01		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Data Industri yang dikelola dengan SIINAS (Sistem Informasi Industri Nasional)	Kota Probolinggo	70%	17.093.780		Kota Probolinggo	70%	Rp18.803.158
3	31	04	2.01	01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Kota Probolinggo	4	17.093.780		Kota Probolinggo	4	Rp18.803.158
JUMLAH									9.968.017.699				10.964.819.469

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo Tahun 2025 merupakan landasan fundamental dalam rangka menjamin konsistensi dan sinkronisasi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Selain itu Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo Tahun 2025 merupakan pengendali dan pengevaluasi pelaksanaan kegiatan di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo tahun lalu dan sebagai acuan untuk kegiatan yang akan datang.

Undang-undang jangka Panjang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan rencana pembangunan tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Amanat undang-undang tersebut dijabarkan kedalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo harus selalu menjaga kualitas kinerja, karena hal tersebut akan terkait langsung dengan kualitas sumber daya manusia aparatur Pemerintah di Kota Probolinggo. Dengan terselesainya Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo Tahun 2025 ini semoga dapat memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat khususnya masyarakat Kota Probolinggo.

Probolinggo, Januari 2024

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
TENAGA KERJA KOTA PROBOLINGGO



BUDI MO WIRAWAN, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda

Nip. 19691220 199003 1 009